

RANCANGAN PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang   : a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024;
- b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024;
- Mengingat    : 1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang selanjutnya disebut *Road Map* RB KKP 2020-2024 adalah dokumen rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 2

- (1) *Road Map* RB KKP 2020-2024 merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.
- (2) *Road Map* RB KKP 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian.
- (3) *Road Map* RB KKP 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian;
  - c. kegiatan reformasi birokrasi tahun 2020-2024;

- d. rencana kerja pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi tahun 2020-2024; dan
  - e. penutup.
- (4) *Road Map* RB KKP 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

*Road Map* RB KKP 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan rencana aksi tahunan reformasi birokrasi pada Unit Kerja Eselon I, rencana aksi tahunan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dan *quick wins*.

#### Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR . . . .

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2021  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Birokrasi pemerintah menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi kekayaan negara.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda ketujuh pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas menjadi perhatian serius. Dalam kaitan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berperan untuk mewujudkan pencapaian agenda tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Terkait dengan tugas tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
5. pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
9. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### B. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain:

1. adanya inovasi *One Stop Service Quarantine (OSS-Q)* yang dapat memangkas waktu pelayanan karantina ikan dari delapan hari menjadi empat hari sehingga terjadi efisiensi biaya logistik kontainer sebesar 50% masuk ke dalam TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;
2. diterapkannya manajemen talenta dengan menggunakan aplikasi *Talent Management* yang mendokumentasi data potensi pegawai yang dipetakan sebelumnya, penilaian kinerja, serta hasil assessment pegawai yang nantinya data tersebut dijadikan pertimbangan dalam pemetaan pegawai (penempatan, mutasi/rotasi, pengembangan, dan promosi);
3. mulai dilaksanakannya program *Golden Hand Shake* yang bertujuan untuk mempersiapkan pensiun Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi wirausahawan bisnis bidang kelautan dan perikanan yang berdaya saing serta ikut membenahi tata niaga produk kelautan dan perikanan Indonesia;
4. penguatan sistem informasi dan teknologi dengan penyediaan sistem informasi dan teknologi yang handal untuk komunikasi data dan informasi dengan stakeholders pemerintah dan masyarakat; dan
5. penetapan proses bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Pencapaian pelaksanaan program mikro reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara detail diuraikan berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, sebagai berikut:

### **1. Manajemen Perubahan**

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mewujudkan komitmennya untuk mewujudkan perubahan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan, yaitu:

- a. telah dibentuk sejumlah 171 Agen Perubahan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 333/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Pengangkatan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. sebagai tindak lanjut atas pengangkatan Agen Perubahan, telah dilakukan Forum Agen Perubahan secara rutin di tahun 2018 dan 2019. Forum ini dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dilaksanakan briefing reformasi birokrasi setiap hari Senin pagi yang didahului doa bersama dan didokumentasikan ke seluruh media sosial unit kerja dengan menggunakan tagar #RBKKPHEBAT. Materi briefing pagi disiapkan oleh masing-masing penanggung jawab program reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh penanggung jawab Program Manajemen Perubahan. Briefing pagi diharapkan mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara merata, tidak hanya di level pusat tetapi hingga level unit kerja;
- d. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilakukan studi banding ke Kementerian Keuangan (*Central Transformation Office*) yang sukses melaksanakan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) sejak tahun 2014. Peserta

studi banding adalah perwakilan penanggung jawab program reformasi birokrasi dan Agen Perubahan.

## **2. Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Penataan peraturan perundang-undangan dilaksanakan untuk menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Peningkatan kualitas regulasi yang melindungi, dan berpihak kepada publik, akan mendorong iklim kondusif bagi usaha di sektor kelautan dan perikanan, selain itu keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan diharapkan dapat membuat peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa adanya penolakan dari masyarakat.

Pada tahun 2015-2019 telah dilaksanakan penataan peraturan perundang-undangan dengan pencapaian sebagai berikut

- a. telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap 629 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan rincian:
  - 1) 468 peraturan yang masih berlaku, yang terdiri dari
    - a) 272 peraturan yang harmonis; dan
    - b) 196 peraturan yang tidak harmonis;
  - 2) 161 peraturan yang sudah tidak berlaku;
- b. telah dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat;
- c. telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. telah dilakukan pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan selama periode 2015-2019 dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut

- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/KEPMEN-KP/2015 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015;
  - 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/KEPMEN-KP/2016 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
  - 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2017 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;
  - 4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018; dan
  - 5) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/KEPMEN-KP/2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019;
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menghasilkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tabel dibawah ini

JENIS PERATURAN	TAHUN					JUMLAH
	2015	2016	2017	2018	2019	
Undang-undang	0	1	0	0	0	1
Perppu	0	0	0	0	0	0
Peraturan Pemerintah	3	0	1	0	1	5
Peraturan Presiden	4	2	0	0	3	9
Keputusan Presiden	0	0	0	0	0	0
Instruksi Presiden	0	0	0	0	0	0
Peraturan Menteri	63	17	68	67	50	265
Keputusan Menteri	133	88	55	97	57	430
Instruksi Menteri	0	0	0	0	0	0
Peraturan Bersama	0	0	0	0	0	0
Keputusan Bersama	0	0	0	0	0	0
Keputusan a.n. Menteri	147	82	358	143	151	881

- f. telah dikembangkan aplikasi informasi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya <http://infohukum.kkp.go.id/>

- menjadi <http://jdih.kkp.go.id/> dan sudah terintegrasi dengan <https://jdihn.go.id/> milik BPHN Kementerian Hukum dan HAM;
- g. selain publikasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH sosialisasi Peraturan Perundang-undangan juga dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan melibatkan anggota DPR, dengan sasaran para pemangku kepentingan di daerah.

### **3. Penataan dan Penguatan Organisasi**

Penataan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan guna merespon dan beradaptasi terhadap tuntutan dinamika lingkungan eksternal dan internal yang berkembang dengan dinamis. Hal ini bertujuan agar organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi lebih efektif, efisien, memberikan pelayanan prima, serta lebih lincah (*agile*). Oleh karena itu, organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dituntut agar dapat menjadi organisasi yang fleksibel untuk mengimbangi tantangan/kebutuhan organisasi yang semakin berkembang.

Adapun pencapaian penataan dan penguatan organisasi tahun 2015 s.d. 2019, yaitu:

- a. Penataan Organisasi Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 1) Penataan Organisasi Tahun 2015  
Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan organisasi yang dilakukan, yaitu adanya perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi pada dua unit kerja eselon I, yaitu:
    - a) semula Direkrorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; dan
    - b) semula Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menjadi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
  - 2) Penataan Organisasi Tahun 2017  
Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan organisasi yang dilakukan, yaitu

- a) Penggabungan 2 (dua) unit kerja eselon I, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- b) Menghapus Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

3) Penataan Organisasi Tahun 2018

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan organisasi dilakukan lingkup Sekretariat Jenderal, yaitu

- a) perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi pada Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menjadi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
- b) perubahan nomenklatur, dan penambahan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa pada Biro Umum menjadi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa;
- c) penambahan fungsi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal pada Biro SDM Aparatur, yaitu semula Bagian Manajemen Kinerja Individu dan Informasi berubah menjadi Bagian Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal;
- d) memindahkan fungsi keprotokolan yang semua berada pada Biro Umum diubah menjadi di bawah Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- e) memindahkan fungsi perizinan terpadu yang semula berada pada Biro Umum dipindahkan kepada Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

b. Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan

1) Penataan Organisasi UPT Tahun 2016

- a) Pembentukan UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Karawang, Kupang, dan Bone;
  - b) Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong;
- 2) Penataan Organisasi UPT Tahun 2017
- a) perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi penelitian dan pengembangan menjadi riset, serta penyesuaian kedudukan Unit Pelaksana Teknis

<b>NO.</b>	<b>SEMULA</b>	<b>MENJADI</b>
1.	Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
3.	Balai Penelitian Perikanan Laut	Balai Riset Perikanan Laut
4.	Balai Penelitian Pemuliaan Ikan	Balai Riset Pemuliaan Ikan
5.	Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias	Balai Riset Budidaya Ikan Hias
6.	Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
7.	Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
8.	Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Loka Riset Budidaya Rumput Laut
9.	Loka Penelitian Perikanan Tuna	Loka Riset Perikanan Tuna
10.	Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

- b) perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi penelitian dan pengembangan menjadi riset, penyesuaian kedudukan Unit Pelaksana Teknis, dan penambahan fungsi penyuluhan perikanan

<b>NO.</b>	<b>SEMULA</b>	<b>MENJADI</b>
1.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
2.	Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
3.	Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
4.	Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

- c) perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi dengan menambahkan fungsi penyuluhan perikanan, serta penyesuaian kedudukan Unit Pelaksana Teknis, yaitu semula Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
  - d) penyesuaian kedudukan Unit Pelaksana Teknis pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Sekolah Tinggi Perikanan, dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
  - e) penataan organisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
  - f) penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 3) Penataan Organisasi UPT Tahun 2018
- a) penyesuaian kedudukan Unit Pelaksana Teknis pada
    - i. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo;
    - ii. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
    - iii. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
    - iv. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang;
    - v. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang; dan
    - vi. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone;
  - b) pembentukan Unit Pelaksana Teknis
    - i. Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai;
    - ii. Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran;dan

- iii. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- 4) Penataan Organisasi UPT Tahun 2019
  - a) Pembentukan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana;
  - b) perubahan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan; dan
  - c) peningkatan eselonering Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan (Semula Eselon III.b menjadi Eselon III.a).

#### **4. Penataan Tata Laksana**

Pencapaian pada program penataan tata laksana tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu:

- a. pada tahun 2015 capaian penataan tata laksana sebagai berikut:
  - 1) pembangunan sistem SOP *online* Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk peningkatan kecepatan berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan;
  - 2) pembangunan Sistem Informasi Disposisi Elektronik (SIDOEL) untuk mendukung percepatan administrasi pemerintahan;
  - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi perizinan bidang kelautan dan perikanan untuk kemudahan *stakeholders* Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengurus dokumen perizinan berusaha;
- b. pada tahun 2016 capaian penataan tata laksana sebagai berikut:
  - 1) penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 104/KEPMEN-KP/SJ/2016 tentang Tim Satu Data Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 2) penetapan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 3) pengelolaan kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai 64 dengan kategori cukup;
- c. pada tahun 2017 capaian tata laksana sebagai berikut:



- 1) penerapan SOP *online* dalam *website* RB KKP;
  - 2) mengintegrasikan aplikasi IPHP-Online, Sisterkaroline dan Simwaskan sehingga terjadi integritas data, mencegah duplikasi dan mencegah redundansi, menyajikan informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui *website* [isi.kkp.go.id](http://isi.kkp.go.id);
  - 3) finalisasi Aplikasi Satu Data, pemanfaatan aplikasi tersebut adalah seluruh rangkaian aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh Pengolah Data untuk memasukkan data yang dikumpulkan dan dapat divalidasi oleh Validator Pusat dan Validator Daerah melalui *website* [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id). Aplikasi Satu Data KP merupakan aplikasi terintegrasi, yang memiliki beberapa modul, yaitu: KUSUKA, Produksi, Bantuan Pemerintah, dan e-Penyuluh;
  - 4) penetapan Instruksi Menteri Nomor 145/MEN-KP/III/2017 tentang Penggunaan Alamat Surel Elektronik Kedinasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 5) pembangunan aplikasi e-Dalwas untuk kebutuhan pengendalian dan pengawasan;
- d. pada tahun 2018 capaian tatalaksana sebagai berikut:
- 1) indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) memperoleh nilai 3,38 dengan tingkat kematangan predikat baik;
  - 2) penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai badan publik yang cukup informatif dengan nilai 68,82;
  - 3) pengelolaan kearsipan memperoleh nilai 83,07 dengan kategori baik;
  - 4) penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi KKP;
  - 5) penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 6) pembangunan aplikasi tata naskah kedinasan elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta administrasi perkantoran lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 7) pengembangan aplikasi kepegawaian SIMPEG menjadi e-Pegawai untuk meningkatkan fungsinya menjadi terintegrasi dengan modul SKP, presensi, perhitungan tunjangan kinerja, *logbook*, penilaian 360, dan *talent management*;
- e. pada tahun 2019 capaian tata laksana sebagai berikut:
- 1) indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) memperoleh nilai 3,57 dengan tingkat kematangan predikat sangat memuaskan;
  - 2) pengelolaan kearsipan memperoleh nilai 92,75 dengan kategori sangat memuaskan;
  - 3) penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai badan publik yang informatif;
  - 4) penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Komisi Satu Data dan Komite Pengarah Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 5) penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Forum Satu Data dan Forum Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 6) penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 7) penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 8) pengembangan *website* PPID menjadi e-PPID sehingga registrasi pemohon dan permintaan informasi pemberian informasi melalui aplikasi dan pembangunan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan seluruh PPID Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 9) pembangunan aplikasi sistem yang mengubah media pembelajaran manual ke dalam bentuk *website* dan peserta

mendapatkan materi-materi pembelajarannya secara *online* melalui *website* <http://elearning.kkp.go.id/>;

- 10) pembangunan aplikasi berbasis android yaitu *mobile* statistik untuk diseminasi data statistik utama Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya data infografis, publikasi, IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan, data produksi perikanan, data produksi garam, data luas lahan budidaya, data RTP, dan lain-lain;
- 11) pembangunan aplikasi Satu Data modul KUSUKA *Mobile* yang berfungsi untuk mendata pelaku usaha kelautan dan perikanan secara *online* di wilayah Kabupaten/Kota yang akurat dan terkini serta terintegrasi dengan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
- 12) pengembangan aplikasi Layanan Perkantoran Persuratan, Disposisi, dan Arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu e-layar dengan menerapkan tanda tangan elektronik (*e-Signature*) yang bekerjasama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) melalui BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) untuk menerbitkan *e-Signature*. Penerapan *e-Signature* untuk keperluan korespondensi seperti memorandum, nota dinas, undangan dan surat dinas;
- 13) penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 14) penetapan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 68/KEP-DJPT/2019 tentang Peta Bisnis Proses Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- 15) penetapan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 222/KEP-DJPB/2019 tentang Peta Bisnis Proses Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- 16) penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta Bisnis Proses lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 17) penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 106/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Peta Bisnis

Proses lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

- 18) penetapan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 338/KEP-ITJEN/2019 tentang Peta Bisnis Proses Inspektorat Jenderal;
- 19) penetapan Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Nomor 72/KEP-BRSDM/2019) tentang Peta Proses Bisnis Badan Riset Sumber Daya Manusia;
- 20) penetapan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Nomor 151/KEP-BKIPM/2019 tentang Peta Proses Bisnis Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

## **5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia**

Pencapaian area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu

- a. pada tahun 2015
  - 1) hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai Refromasi Birokrasi untuk program Penataan Sistem Manajemen SDM adalah 10,52 dari nilai maksimum 15,00;
  - 2) pada tanggal 16 Januari 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas keberhasilannyadalam melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan metoda Computer Assissted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara secara Cepat, Akuntabel, dan Transparanserta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotismedalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan bermartabat;
  - 3) pada tanggal 5 Juni 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Terbaik III untuk Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
- b. pada tahun 2016
  - 1) hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai Refromasi Birokrasi

untuk program Penataan Sistem Manajemen SDM adalah 12,74 dari nilai maksimum 15,00;

- 2) Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Edaran Nomor 234/MEN-KP/V/2016 tentang Langkah-langkah Penataan Sumberdaya Manusia Aparatur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan Pengisian Jabatan Struktural, Pembinaan kepada Pejabat yang baru dilantik, dan Pembinaan terhadap pejabat/pegawai yang tidak lagi menduduki jabatan struktural;
- c. pada tahun 2017
- 1) hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai Refromasi Birokrasi untuk program Penataan Sistem Manajemen SDM adalah 13,35 dari nilai maksimum 15,00;
  - 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kemeneterian Kecil;
  - 3) pada tanggal 27 Agustus 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima Apresiasi dari PPM Manajemen Kategori Komitmen Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Eksekutif;
- d. pada akhir tahun 2018
- 1) hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai Refromasi Birokrasi untuk program Penataan Sistem Manajemen SDM adalah 13,53 dari nilai maksimum 15,00;
  - 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Anugerah KASN 2018 untuk kategori Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam hal Pengisian JPT Pratama melalui mekanisme *Talent Pool*, sesuai dengan Surat KASN Nomor 1922/KASN/9/2018;
  - 4) mulai tanggal 5 Juli 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan uji coba penerapan penilaian

perilaku 3600 yang terdiri dari unsur atasan, se-level, dan bawahan;

- 5) pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan dari sejumlah 1.733 Pejabat Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan dengan rincian 6 (enam) Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang Pengawas Perikanan, 3 ASN bidang Penyuluh Perikanan, 3 (tiga) ASN bidang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, 2 (dua) ASN bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2018 tentang Penilaian Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
  - 6) wajib lapor LHKPN tahun 2018 telah melaporkan LHKPN pada tahun 2019 sebesar 100 %, namun yang tepat waktu sebesar 44,19%;
- e. pada Tahun 2019
- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima Penghargaan Badan Kepegawaian Negara Awards 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Pemenang Kategori Komitmen Pengawasan Tingkat Kementerian untuk pencapaian pengisian LHKPN;
  - 2) pada tanggal 28 Januari 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi yang menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
  - 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun draft pola karir di lingkungan KKP dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN dan RB, dan disarankan oleh Kementerian PAN dan RB untuk menunggu pola karir nasional yang sedang disusun;
  - 4) penilaian Sistem Merit Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara mandiri tahun 2019 dengan nilai 352,2 (88%), sedangkan hasil penilaian KASN adalah 361,5 (90%), sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi dapat direkomendasikan

untuk dikecualikan dari pelaksanaan seleksi terbuka setelah berkoordinasi dengan KASN. Penilaian Sistem Merit yang dilakukan secara mandiri tahun 2020 dengan nilai 378,5 atau 95%;

- 5) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan rotasi, mutasi dan promosi serta pelantikan pejabat JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas berdasarkan hasil asesmen;
- 6) data simpeg dengan data kepegawaian Badan Kepegawaian Negara masih dalam proses integrasi;
- 7) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun draft kamus kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan, dan pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/KEPMEN-KP/2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan, serta telah diusulkan standar kompetensi jabatan sejumlah 118 ke Kementerian PAN dan RB;
- 8) Wajib Lapor LHKPN Tahun 2019 telah melaporkan LHKPN dan tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 100%;
- 9) pada Tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan formasi jabatan di bidang pengelola keuangan lulusan politeknik STAN sejumlah 97, namun formasi yang diterima KKP hanya 16
- 10) pelanggaran disiplin pada tahun 2019 sejumlah 57, hal tersebut mengalami penurunan dari tahun 2018 sejumlah 93;
- 11) pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan sejumlah 1.305 jabatan dan disetujui oleh Menteri PAN dan RB sejumlah 1.136, yang terdiri dari 194 Jabatan Administrator, 752 jabatan pengawas, dan 190 jabatan pelaksana (Eselon V);
- 12) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki rencana suksesi bagi seluruh jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas.

## 6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui upaya penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) dan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang dimulai dari tahun 2013. Ini berdampak pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 memperoleh “kategori A” dengan nilai berturut-turut dari tahun 2015 (80,76), tahun 2016 (84,54), tahun 2017 (82,45), tahun 2018 (81,64), tahun 2019 (82,04).

Adapun upaya lain dalam meningkatkan penerapan manajemen kinerja yang lebih baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan:

- a. optimalisasi *performanced based budgeting* melalui penyederhanaan nomenklatur anggaran, efisiensi harga satuan, penajaman arsitektur program sampai dengan komponen;
- b. penyusunan pedoman pengelolaan kinerja;
- c. peningkatan kapasitas pengelola kinerja melalui Forum Manajemen Kinerja, Bimtek/Diklat Kinerja, pendampingan SAKIP di Pusat dan UPT, dan *benchmarking* Kinerja;
- d. integrasi sistem pengendalian pengawasan anggaran dan kinerja;
- e. penetapan kinerja Dekonsentrasi melalui Perjanjian Kinerja;
- f. penerapan perjanjian kinerja jabatan fungsional;
- g. *reward and punishment* berbasis kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. pemantauan dan evaluasi internal melalui Penilaian Mandiri SAKIP, dan Rekonsiliasi Kinerja sampai dengan UPT; dan
- i. penghargaan SAKIP kepada unit-unit yang berkinerja baik.

Langkah ini melibatkan seluruh pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai ke level UPT dalam rangka menjamin penerapan SAKIP yang semakin baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.



## 7. Penguatan Pengawasan

Pencapaian kegiatan penguatan pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu:

- a. Indeks Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan katagori “Terdefinisi” dan berada pada Level 3, dengan perolehan nilai yaitu 3,032 pada Tahun 2016, 3,105 pada Tahun 2017, 3,462 pada Tahun 2018, dan 3,507 pada Tahun 2019;
- b. pengelolaan laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah terintegrasi dengan aplikasi Gratifikasi On Line (GOL) KPK RI, jumlah laporan pengendalian gratifikasi Tahun 2015 s.d. 2019, yaitu gratifikasi dianggap suap sebanyak 135 kasus, gratifikasi kedinasan sebanyak 100 kasus, dan gratifikasi tidak dianggap suap dan kedinasan sebanyak 25 kasus;
- c. Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah terintegrasi dengan aplikasi LAPORI Kementerian PAN dan RB, jumlah laporan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) Tahun 2015 sampai dengan 2019 yang seluruhnya telah ditangani sebanyak 836 pengaduan. Pada Tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh penghargaan TOP 30 dari Kementerian PAN dan RB sebagai Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik (Pengaduan Masyarakat berbasis digital, cepat respon dan ditindaklanjuti);
- d. Pembangunan Zona Integritas mulai Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 76 satker atau 39,79 % dari total 191 satker. Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diantaranya melalui:
  - 1) sosialisasi pedoman evaluasi pembangunan zona integritas;
  - 2) evaluasi pembangunan zona integritas;
  - 3) pemantauan pembangunan zona integritas; dan
  - 4) prapenilaian dan penilaian oleh Tim Penilai Internal;

- e. capaian kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yg berpredikat WBK secara kumulatif selama 2014 sampai dengan 2019 baik melalui penilaian eksternal (Kementerian PAN dan RB) maupun penilaian internal adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut

<b>NO.</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>TAHUN PREDIKAT WBK</b>
1.	Balai Karantina Ikan Kelas II Semarang	2014 *)
2.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi	2014 *)
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kalimantan Barat	2015 *)
4.	Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan	2016 *)
5.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	2017
6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	2017
7.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017
8.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Sumatera Utara	2017
9.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak, Kalimantan Barat	2017
10.	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	2017
11.	Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Jawa Tengah	2017
12.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Jawa Tengah	2017
13.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	2017
14.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol	2017
15.	Direktorat Logistik	2017
16.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	2018
17.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, Ambon	2018
18.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Manado	2018
19.	Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	2018
20.	Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBAT) Mandiangin	2018
21.	Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung	2018
22.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018

NO.	UNIT KERJA	TAHUN PREDIKAT WBK
23.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	2019
24.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	2019
25.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong	2019
26.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi	2019
27.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat	2019
28.	Pangkalan Pengawasan SDKP (PPSDKP) Benoa	2019
29.	Pangkalan Pengawasan SDKP (PPSDKP) Jakarta	2019
30.	Balai Riset Observasi Laut (BROL) Batam	2019
31.	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam	2019
32.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang	2019
33.	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBPPHP) Jakarta	2019
34.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II	2019
35.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar	2019

- f. Penanganan Benturan Kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pemetaan indentifikasi situasi dan strategi penanganannya pada tingkat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Opini Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh BPK mulai Tahun 2015 sampai dengan 2019 secara berturut-turut yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2015, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 dengan tidak memberikan opini (*disclaimer*), dan mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan capaian opini WTP;
- h. dukungan APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh indeks *capability audit model* (IACM) dari BPKP mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berada pada level 3 (terintegrasi). Terkait pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan aplikasi SIDAK yang

memudahkan Pemantauan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal secara *real time*.

#### **8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pada periode tahun 2015-2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan berbagai penghargaan dalam program peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya

- a. hasil pencapaian nilai Reformasi Birokrasi area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian PAN dan RB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan baik dari komponen pengungkit yaitu dari nilai 4,25 tahun 2015 meningkat menjadi 4,90 tahun 2019 maupun dari komponen hasil yaitu dari nilai 7,32 menjadi 8,80 pada tahun 2019. Peningkatan ini menandakan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilihat dari perspektif internal proses maupun dari persepsi masyarakat;
- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 mendapatkan penghargaan peringkat ketujuh dalam keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan kategori informatif;
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 mendapatkan predikat Kepatuhan Tinggi (zona hijau) dari hasil Evaluasi Ombusman RI yaitu kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan berdasarkan UU No.25 Tahun 2009;
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 mendapat penghargaan peraih Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat nasional melalui Inovasi pelayanan *One Stop Service* “JESIKA IMUT PISAN Melayani Anda Sampai Anda Minta Lagi” dari Stasiun KIPM Bandung, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berhasil meraih Top 30 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB;
- f. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berhasil meraih penghargaan Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Pelayanan “One Stop Service-Quarantine (OSS-Q)” dari

- Balai KIPM Surabaya II, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- g. Sistem Pemantauan Kapal SPKP Direktorat Jenderal PSDKP berhasil meraih penghargaan sebagai "instansi pemerintah yang memiliki inisiatif membangun kualitas kebijakan publik yang baik" oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada tahun 2019;
  - h. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berhasil mendapatkan penilaian indeks pelayanan publik dengan kategori sangat baik 4,18 (A-) dari Kementerian PAN dan RB melalui Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai KIPM Semarang. Berdasarkan nilai tersebut maka BKIPM Semarang masuk dalam *role model* penyelenggaraan pelayanan publik tingkat nasional;
  - i. Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berhasil memperoleh penghargaan Anugerah Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan kategori sangat informatif.

## 9. **Quick Wins**

Suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawal program besar yang merupakan kegiatan utama (*core business*) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan periode tahun 2015-2019, antara lain

- a. integritas IPHP *online* Sisterkaronlie Aku Bisa, Seketika, Siswaskan, hasil yang diharapkan sistem perizinan terintegrasi mulai dari penerbitan sampai dengan pengawasan;
- b. optimalisasi program pengendalian Gratifikasi yang efektif dan akuntabel, hasil yang diharapkan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di Unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c. implementasi pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Layanan Aspirasi dan Pengasuan Online Rakyat (LAPOR), hasil yang diharapkan LAPOR meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
- d. optimalisasi Peran Tunas Integritas/Agen Perubahan, hasil yang diharapkan meningkatnya peran tunas integritas dalam

- pembangunan integrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. integrasi aplikasi perizinan *online*, hasil yang diharapkan sistem perizinan terintegrasi mulai dari penerbitan sampai dengan pengawasan, meliputi
    - 1) HACCP dengan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
    - 2) Aplikasi Perizinan (SIPEPI) dengan Buku Kapal Perikanan (SIPALKA);
    - 3) pelayanan perizinan dan SIKPI;
    - 4) proses pemasukan ikan dengan sistem INSW;
    - 5) pengawasan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan *computer integrated for open system architecture*; dan
    - 6) pengelolaan pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan layanan aspirasi dan Laporan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR);
  - f. pembangunan Sistem Notifikasi Masa Berlaku (SINOMAS) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); dan
  - g. penerapan Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) pada importasi komoditas perikanan.

#### C. ISU STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Memperhatikan berbagai capain, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dihadapkan pada sejumlah kondisi yang secara objektif dapat menghambat terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dapat diuraikan sebagai berikut

1. Kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi pada level unit kerja belum setara dengan pelaksanaan di tingkat kementerian dan belum terlihat perubahan yang signifikan;
2. Evaluasi atas kinerja para Agen Perubahan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan di level unit kerja/UPT;
3. Komitmen pimpinan di level pusat harus diikuti komitmen pimpinan level di bawahnya sehingga menjadi satu kesatuan yang mampu menggerakkan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja;

4. Evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengendalian internal terkait pelaporan keuangan belum berjalan dengan baik;
6. Belum optimalnya implementasi pelayanan publik, khususnya di unit kerja dalam hal pemberian reward and punishment dan pemberian kompensasi terhadap penerima layanan yang tidak sesuai dengan standar;
7. Kinerja sebagian unit kerja dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan, dan cukup;
8. Belum sepenuhnya ada rotasi pegawai dilakukan secara sistematis dan rutin utamanya di unit pelayanan teknis. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi potensi *fraud* (penipuan);
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan belum optimal dalam pembangunan sistem yang tegintegrasikan dengan Indonesia National Single Windows (INSW) sehingga rekomendasi yang dikeluarkan oleh KKP bisa tersambung secara online; dan
10. Pembangunan Zona Integritas belum cukup masif dan intensif ke seluruh unit kerja pelayanan utamanya pada unit pelayanan teknis yang ada pada kawasan strategis.

BAB II

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

A. KEGIATAN LEVEL MIKRO REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, kegiatan mikro yang menjadi prioritas dalam menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS
1.	Manajemen Perubahan	a. pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan ( <i>reform</i> ) b. penguatan nilai integritas c. pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> d. pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
2.	Deregulasi Kebijakan	a. melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan) b. deregulasi aturan yang menghambat birokrasi penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Instansi Pemerintah c. melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan d. melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
3.	Penataan Organisasi	a. asesmen organisasi berbasis kinerja b. restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan instansi pemerintah berdasarkan hasil asesmen c. membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi
4.	Penataan Tata Laksana	a. penerapan tata kelola SPBE b. penerapan manajemen SPBE c. penerapan layanan SPBE d. mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan e. implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital) f. melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan g. mengimplementasikan digitalisasi arsip h. melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan i. melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku j. penguatan implementasi keterbukaan informasi publik



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. pengembangan proses bisnis instansi dan unit</li> <li>l. penyesuaian proses bisnis dan SOP</li> </ul>
5.	Sistem Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i></li> <li>b. penetapan ukuran kinerja individu</li> <li>c. pemantauan dan evaluasi kinerja individu secara berkala</li> <li>d. penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> berdasarkan kinerja</li> <li>e. pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi</li> <li>f. pemanfaatan IT dalam manajemen ASN</li> <li>g. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN</li> <li>h. pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>talent pool</i>)</li> <li>i. penguatan <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN</li> </ul>
6.	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and crosscutting</i>)</li> <li>b. penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja</li> <li>c. meningkatkan kualitas penyesuaian kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)</li> <li>d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala</li> <li>e. pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran</li> <li>f. penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja</li> </ul>
7.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi</li> <li>b. meningkatkan Kompetensi APIP</li> <li>c. pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)</li> <li>d. melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku</li> <li>e. melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan</li> <li>f. pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</li> <li>g. penguatan pengendalian gratifikasi</li> <li>h. penguatan penanganan pengaduan dan komplain</li> <li>i. penguatan efektivitas manajemen risiko</li> <li>j. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan</li> </ul>
8.	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)</li> <li>b. pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan</li> <li>c. pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik</li> </ul>

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau</li> <li>e. penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>f. pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik</li> <li>g. pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala</li> <li>h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala</li> <li>i. mendorong Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat</li> <li>j. meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul>

**B. KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024**

Berdasarkan capaian dan isu strategis yang diuraikan pada bab sebelumnya, dilakukan penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi yang terdiri dari area perubahan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, sebagai berikut

NO.	AREA PERUBAHAN	ISU STRATEGIS	KEGIATAN
1.	Manajemen Perubahan	1. Nilai-nilai organisasi (cerdas, akuntabel, integritas, loyalitas, inovatif, kerja sama, disiplin, profesional, dan pelayanan prima) belum terinternalisasi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi nilai-nilai organisasi melalui media komunikasi</li> <li>2. Melakukan internalisasi nilai-nilai organisasi oleh Pimpinan tertinggi</li> <li>3. Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan (reform)</li> </ul>
		2. Sistem integritas belum terinternalisasi dengan baik	Internalisasi sistem integritas
		3. Evaluasi atas kinerja para Agen Perubahan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan di unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemutakhiran dan pembentukan Agen Perubahan</li> <li>2. Menyusun rencana kerja Agen Perubahan yang terintegrasi dalam sistem manajemen</li> <li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana</li> </ul>

NO.	AREA PERUBAHAN	ISU STRATEGIS	KEGIATAN
			kerja Agen Perubahan secara berkala
		4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas belum optimal	Melakukan inovasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan tugas
2.	Deregulasi Kebijakan	Evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017.</li> <li>2. Menyusun petunjuk teknis penyusunan kajian tertulis rancangan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i>.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> </ol>
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Pelaksanaan penataan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang efisiensi dan efektivitas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Penataan Organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan rencana strategis</li> <li>2. Pelaksanaan Penataan Organisasi berdasarkan hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional</li> <li>3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan dengan pengajuan perubahan organisasi dan penyederhanaan birokrasi</li> <li>4. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah</li> </ol>

NO.	AREA PERUBAHAN	ISU STRATEGIS	KEGIATAN
			5. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dengan pengajuan perubahan organisasi 6. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dengan menetapkan struktur organisasi yang tepat fungsi 7. Pelaksanaan asesment organisasi berbasis kinerja 8. Pelaksanaan restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen
4.	Penataan Tata Laksana	1. Proses bisnis mempengaruhi birokrasi dan penerapan SOP dalam setiap kegiatan pegawai  2. Pengelolaan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	1. Penyusunan proses bisnis sesuai dengan tugas, fungsi, rencana strategis, rencana kerja organisasi dan selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang 2. Penjabaran peta proses bisnis ke dalam SOP 3. Penerapan SOP dalam setiap kegiatan pegawai 4. Pelaksanaan evaluasi peta proses bisnis dan SOP  1. Penyusunan dan pelaksanaan arsitektur, peta rencana, tim koordinasi, serta manajemen layanan SPBE 2. Pengembangan dan pengintegrasian aplikasi administrasi pemerintahan meliputi kepegawaian, kearsipan, perencanaan, penganggaran dan kinerja organisasi. 3. Pengembangan dan pengintegrasian aplikasi pelayanan publik. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE di lingkup KKP
5.	Panataan Sistem Manajemen SDM	1. Pengelolaan sistem merit	1. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan.

NO.	AREA PERUBAHAN	ISU STRATEGIS	KEGIATAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel.</li> <li>3. Penyusunan Analisis Kesenjangan kompetensi.</li> <li>4. Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta, penetapan rencana kelompok suksesi.</li> <li>5. penyiapan bahan kajian, analisis, monitoring, evaluasi, dan informasi jabatan fungsional.</li> <li>6. Integrasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) KKP.</li> <li>7. Menyempurnakan talent pool yang sudah ada, yaitu dengan melengkapi uji kompetensi teknis dengan standar kompetensi teknik.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menetapkan strategi dan kebijakan bidang SDM yang tepat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Pedoman Pengembangan Kompetensi</li> <li>2. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan</li> <li>3. Penetapan Pola Karir/Manajemen Karir</li> <li>4. Penetapan Jabatan Kritis</li> <li>5. Penetapan pedoman standar kinerja individu JPT, JF, JFU</li> </ol>
6.	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam penyusunan Renstra</li> <li>2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam penyusunan Perjanjian Kinerja</li> <li>3. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi kinerja</li> <li>4. Penguatan pemahaman pimpinan dan seluruh penanggung jawab kinerja</li> </ol>

NO.	AREA PERUBAHAN	ISU STRATEGIS	KEGIATAN
			5. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam pelaporan kinerja
		2. Pengelolaan kinerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacity building SDM pengelola kinerja dan studi tiru</li> <li>2. Pendampingan implementasi SAKIP</li> <li>3. Penetapan Tim Pengelola Kinerja Organisasi</li> <li>4. Penyusunan pedoman pengelolaan kinerja</li> <li>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala</li> <li>6. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran</li> <li>7. Penetapan aturan terkait Tukin berbasis kinerja</li> <li>8. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)</li> </ol>
		3. Menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor ( <i>collaborative and crosscutting</i> )
		4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran KKP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi</li> <li>2. Refocussing anggaran untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi</li> </ol>
7.	Penguatan Pengawasan	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan KKP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi</li> <li>2. Penguatan efektifitas manajemen resiko</li> <li>3. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai keadaan dan aturan yang berlaku</li> <li>4. Melakukan pengelolaan barang/jasa sesuai aturan</li> </ol>

NO.	AREA PERUBAHAN	ISU STRATEGIS	KEGIATAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan kompetensi APIP</li> <li>6. Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturnya)</li> <li>7. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di lingkungan KKP</li> <li>8. Penguatan penanganan pengaduan masyarakat dan komplain</li> <li>9. Penguatan pengendalian gratifikasi</li> <li>10. Kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKS</li> <li>11. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</li> </ol>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan integrasi sistem pelayanan</li> <li>2. Pelaksanaan simplifikasi pelayanan</li> <li>3. Penyiapan regulasi terkait digitalisasi pelayanan</li> <li>4. Pelaksanaan tatalaksana pelayanan digital</li> <li>5. Penetapan standarisasi pelayanan digital</li> <li>6. Peningkatan nilai indeks pelayanan publik KKP</li> <li>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala</li> <li>8. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan</li> <li>9. Peningkatan dan pengembangan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>10. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala</li> <li>11. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan</li> <li>12. Pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas</li> </ol>

NO.	AREA PERUBAHAN	ISU STRATEGIS	KEGIATAN
			pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan

C. KEGIATAN PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Rencana kegiatan prioritas yang menjadi kunci pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Mengelola laman reformasi birokrasi sebagai pusat informasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait penyampaian materi *briefing* reformasi birokrasi yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi yang didahului oleh doa bersama;
- 2) Melaksanakan Forum Agen Perubahan secara berkala dalam rangka monitoring rencana kerja Agen Perubahan dan sebagai sarana komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman Agen Perubahan;
- 3) Komitmen dan konsistensi pimpinan baik di level pusat dan unit kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- 4) Analisis dengan memperhatikan dampak dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan atau analisis *Regulatory Impact Analysis* (RIA) diperlukan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberikan dampak luas di masyarakat meliputi peraturan perundang-undangan yang substansi pengaturannya menyangkut perizinan, pungutan, dan/atau hak dan kewajiban masyarakat, agar kebijakan yang akan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan dapat memperlancar atau mempermudah masyarakat dalam melakukan usaha pada sektor kelautan dan perikanan serta menyelesaikan akar permasalahan yang menghambat kinerja pemerintah;
- 5) Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan Instansi Pemerintah berdasarkan hasil asesmen dengan mempertimbangkan capaian hasil sesuai level masing-masing. Hasil kajian dari asesmen organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dijadikan dasar penyusunan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;



- 6) Penyempurnaan proses bisnis dalam rangka mempengaruhi penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan disertai penerapan SOP dengan evaluasi secara berkala;
- 7) Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Langkah ini melalui kegiatan digitalisasi sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, diantaranya e-pegawai aplikasi untuk kepegawaian, e-layar aplikasi untuk kearsipan, Kinerjaku aplikasi untuk kinerja organisasi, dan *e-planning* aplikasi untuk perencanaan dan anggaran;
- 8) perencanaan kebutuhan/formasi berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan;
- 9) Pelaksanaan rekrutmen pegawai secara objektif, transparan dan akuntabel berbasis jabatan, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dengan sistem komputerisasi;
- 10) Pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun untuk setiap PNS, rencana pengembangan kompetensi *Training Need Analysis* (TNA), pendidikan dan pelatihan, *coaching* dan mentoring berbasis kinerja;
- 11) Penyusunan standardisasi jabatan, penetapan standar kompetensi jabatan, penyusunan profil kompetensi ASN, Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta, penetapan rencana kelompok suksesi;
- 12) Penerapan aspek promosi dan mutasi, yang meliputi penetapan pola karier, pelaksanaan mutasi dan promosi berdasarkan rencana suksesi dan mempertimbangkan pola karier, pengisian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas secara terbuka dan kompetitif, pengisian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas secara terbuka dan kompetitif secara regional/nasional;
- 13) Penerapan aspek manajemen kinerja, kontrak kinerja yang terukur, penilaian kinerja yang objektif dan terukur untuk seluruh pegawai, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja, menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan karier melakukan analisis permasalahan kinerja dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah kinerja yang rendah serta melaksanakan strategi tersebut, penyusunan strategi penyelesaiannya;

- 14) Penerapan aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin, menyusun dan menetapkan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
- 15) menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN yang berlaku, tim penegakan kode etik dan kode perilaku secara konsisten kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa, data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;
- 16) Penerapan aspek perlindungan dan pelayanan kebijakan perlindungan hukum, program persiapan pensiun, dan program lainnya menyediakan fasilitas yg memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;
- 17) Penyelarasan siklus kinerja organisasi melalui aspek SAKIP (mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja) dengan didasarkan pada pemberian reward and punishment;
- 18) Penyempurnaan pilar manajemen kinerja organisasi dari level tertinggi sampai level terendah melalui penerapan pohon kinerja yang di cascade dan di alignment menggunakan pola logic model dan metode *Balanced Scorecard*;
- 19) Penerapan integrasi *e-Planning*, *e-Budgeting*, dan *e-Performance*;
- 20) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM unit kerja di lingkungan KKP merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja;
- 21) Pelayanan yang cepat, transparan, mudah dan murah dengan menerapkan standar pelayanan yang baik dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses integrasi pelayanan dan simplikasi pelayanan;
- 22) Mendorong peningkatan dan pengembangan inovasi dalam pelayanan (one agency one innovation);
- 23) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala, pelaksanaan pelatihan budaya pelayanan prima dan penerapan reward dan punishment sebagai upaya terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik;

BAB III  
RENCANA KERJA PADA 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN  
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

Pada implementasi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan memastikan pengelolaan kegiatan program reformasi birokrasi terlaksana dengan baik, maka disusun rencana kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mencakup dari tindak lanjut isu strategis dan kegiatan prioritas.

Rencana kerja program reformasi birokrasi menjabarkan 8 (delapan) area perubahan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang akan dilaksanakan, mulai dari tujuan, hasil yang diharapkan, kondisi yang menjadi tolak ukur, rincian kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, dan output yang akan dicapai, serta penanggungjawab kegiatan tersebut

Adapun kegiatan rencana kerja per tahun pada 8 (delapan) area perubahan selama kurun waktu tahun 2020-2024, sebagai berikut:

## A. RENCANA KERJA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
				2020	2021	2022	2023	2024			
Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset dan cultureset individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas	1. Semakin konsistennya keterlibatan Pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi	1. Tim RB unit kerja telah dibentuk	1. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim RB	Pembentukan Tim RB KKP	Pembentukan Tim RB KKP	Pembentukan Tim RB KKP	Pembentukan Tim RB KKP	Pembentukan Tim RB KKP	Kepmen Tim RB KKP	Biro Hukum	
				Pembentukan Tim RB unit kerja eselon I	Pembentukan Tim RB unit kerja eselon I	Pembentukan Tim RB unit kerja eselon I	Pembentukan Tim RB unit kerja eselon I	Pembentukan Tim RB unit kerja eselon I	Kepmen Tim RB unit kerja eselon I	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan	
				Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB Quick Wins KKP	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB + Quick Wins KKP	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB + Quick Wins KKP	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB + Quick Wins KKP	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB + Quick Wins KKP	Matriks monitoring dan evaluasi per penanggung jawab program	Penanggung Jawab Program	
		3. Tim RB telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB dan Quick Wins Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB dan Quick Wins Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB dan Quick Wins Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB dan Quick Wins Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja program RB dan Quick Wins Unit Kerja	Matriks monitoring dan evaluasi per unit kerja eselon I	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan	
		4. Road map RB telah disusun dan diformalkan	2. Penyusunan dan pelaksanaan Road Map RB KKP	Penyusunan road map RB KKP 2020-2024	-	-	-	-	Road Map RB KKP 2020-2024	BSDMAO dan Biro Hukum	
		5. Road map telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi									
		6. Road map telah mencakup "quick win"									
		7. Penyusunan road map telah melibatkan seluruh unit organisasi									
		8. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi road map RB kepada organisasi	3. Pelaksanaan sosialisasi/ internalisasi road map RB	-	Sosialisasi road map RB	Internalisasi road map RB	Internalisasi road map RB	Internalisasi road map RB	Internalisasi road map RB	Dokumentasi kegiatan	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
		9. Rencana kerja/rencana aksi RB unit kerja selaras dengan road map	4. Penyusunan rencana aksi RB unit kerja	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan road map RB KKP	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan road map RB KKP	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan road map RB KKP	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan road map RB KKP	Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan road map RB KKP	Rencana aksi RB unit kerja yang selaras dengan road map RB KKP	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan	
		10. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	5. Pelaksanaan rangkaian PMPRB KKP	Pembentukan Tim PMPRB	Pembentukan Tim PMPRB	Pembentukan Tim PMPRB	Pembentukan Tim PMPRB	Pembentukan Tim PMPRB	Pembentukan Tim PMPRB	Kepmen Tim PMPRB KKP	Biro Hukum
11. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan	Sosialisasi pelaksanaan PMPRB	Sosialisasi pelaksanaan PMPRB		Sosialisasi pelaksanaan PMPRB	Sosialisasi pelaksanaan PMPRB	Sosialisasi pelaksanaan PMPRB	Sosialisasi pelaksanaan PMPRB	Dokumentasi Kegiatan	Inspektorat IV		

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		pada masing-masing unit kerja								
		12. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor		Pelatihan Asesor PMPRB	Pelatihan Asesor PMPRB	Pelatihan Asesor PMPRB	Pelatihan Asesor PMPRB	Pelatihan Asesor PMPRB	Sertifikat lulus pelatihan Asesor PMPRB	Inspektorat IV
		13. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor	Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor	Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor	Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor	Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor	Dokumentasi Kegiatan	Penanggung Jawab Program dan BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
		14. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi		Melakukan reviu terhadap kertas kerja	Melakukan reviu terhadap kertas kerja	Melakukan reviu terhadap kertas kerja	Melakukan reviu terhadap kertas kerja	Melakukan reviu terhadap kertas kerja	Kertas kerja yang telah direviu	Penanggung Jawab Program dan BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
		15. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi		Melaksanakan konsensus PMPRB	Melaksanakan konsensus PMPRB	Melaksanakan konsensus PMPRB	Melaksanakan konsensus PMPRB	Melaksanakan konsensus PMPRB	BA hasil konsensus PMPRB	Inspektorat IV
		16. RATL telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		Melaksanakan RATL	Melaksanakan RATL	Melaksanakan RATL	Melaksanakan RATL	Melaksanakan RATL	Laporan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi PMPRB	Penanggung Jawab Program dan BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
		17. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan RB dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya 18. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi	6. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan RB	Pencapaian nilai RB KKP sesuai target dalam Renstra	Pencapaian nilai RB KKP sesuai target dalam Renstra	Pencapaian nilai RB KKP sesuai target dalam Renstra	Pencapaian nilai RB KKP sesuai target dalam Renstra	Pencapaian nilai RB KKP sesuai target dalam Renstra	Nilai RB KKP	Tim RB KKP
	2. Menurunnya resistensi terhadap perubahan	19. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB	7. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi	Melakukan internalisasi nilai-nilai KKP oleh Pimpinan tertinggi	Melakukan internalisasi nilai-nilai KKP oleh Pimpinan tertinggi	Melakukan internalisasi nilai-nilai KKP oleh Pimpinan tertinggi	Melakukan internalisasi nilai-nilai KKP oleh Pimpinan tertinggi	Melakukan internalisasi nilai-nilai KKP oleh Pimpinan tertinggi	Dokumentasi kegiatan	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
	3. Budaya perubahan yang semakin melekat 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman	20. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang RB yang sedang dilakukan	perubahan ( <i>reform</i> )	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi	Dokumentasi kegiatan	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
		21. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan AP ataupun role model	8. Pemutakhiran dan pembentukan Agen Perubahan	Melakukan pemutakhiran dan pembentukan Agen Perubahan	-	Melakukan pemutakhiran dan pembentukan Agen Perubahan	-	Melakukan pemutakhiran dan pembentukan Agen Perubahan	KepmenKP tentang Agen Perubahan	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
		22. AP telah membuat perubahan yang konkret di instansi	9. Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model	-	Menyusun rencana kerja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Menyusun rencana kerja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Menyusun rencana kerja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Menyusun rencana kerja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Renja Agen Perubahan per unit kerja eselon I	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
				-	Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja Agen Perubahan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja Agen Perubahan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja Agen Perubahan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja Agen Perubahan secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi	BHKLN
		23. Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan ( <i>reform</i> )	10. Komitmen Pimpinan terhadap unit kerja yang melakukan perubahan ( <i>reform</i> )	Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan ( <i>reform</i> )	Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan ( <i>reform</i> )	Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan ( <i>reform</i> )	Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan ( <i>reform</i> )	Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang melakukan perubahan ( <i>reform</i> )	Sertifikat penghargaan	BSDMAO/ BHKLN Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
		24. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	11. Penguatan nilai integritas	Internalisasi sistem integritas KKP	Internalisasi sistem integritas KKP	Internalisasi sistem integritas KKP	Internalisasi sistem integritas KKP	Internalisasi sistem integritas KKP	Dokumentasi kegiatan	BSDMAO/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
			12. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 3,6	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 3,7	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 3,8	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 3,9	Target penilaian SPBE KKP oleh Kementerian PAN dan RB sebesar 4	Data dukung penilaian SPBE	Pusdatin

## B. RENCANA KERJA AREA DEREGULASI KEBIJAKAN

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
Menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.	1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (menghilangkan overlapping peraturan)	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.	Inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.	1. Daftar peraturan perundang-undangan yang masih berlaku 2. Matrik identifikasi dan analisis peraturan perundang-undangan	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
	2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya		Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Penyelarasan dengan arah kebijakan yang lebih tinggi dan kebijakan terkait lainnya.	Matrik identifikasi dan analisis peraturan perundang-undangan	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
	3. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat		Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Perubahan, pencabutan/penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Perubahan, pencabutan/penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Perubahan, pencabutan/penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Perubahan, pencabutan/penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Perubahan, pencabutan/penggantian, atau penggabungan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Peraturan Menteri

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/ kajian/ <i>policy paper</i> , dan paraf koordinasi	Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017	Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bimbingan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bimbingan teknis evaluasi peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	.....	1. Peraturan Menteri 2. Petunjuk Teknis Penyusunan <i>Regulatory Impact Analysis</i> 3. Laporan Sosialisasi/ Sertifikat 4. Lamporan Bimbingan Teknis/Sertifikat	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
				Penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis <i>Regulatory Impact Analysis</i> .	Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis <i>Regulatory Impact Analysis</i>	Bimbingan Teknis penyusunan <i>Regulatory Impact Analysis</i>	.....	.....		
			Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Evaluasi implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017	.....	.....	Pemantauan dan evaluasi implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis <i>Regulatory Impact Analysis</i> .	Pemantauan dan evaluasi implementasi Peraturan Menteri KP tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Laporan Evaluasi	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan



TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi/penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Keputusan Menteri	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan
		Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha	Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	evaluasi penerapan kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan bidang kelautan dan perikanan di masyarakat	Laporan evaluasi	1. Biro Hukum 2. Sekretariat Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan

### C. RENCANA KERJA AREA PENATAAN ORGANISASI

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah.	4. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Meningkatnya kapasitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 6. Terciptanya desain organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung kinerja	Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis	Pelaksanaan Penataan Organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan rencana strategis		Penyusunan dan/atau analisis Naskah Akademik Penataan Organisasi KKP dan UPT di lingkungan KKP	Analisis Naskah Akademik Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP	Analisis Naskah Akademik Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP	Penyusunan dan/atau analisis Naskah Akademik Penataan Organisasi KKP dan UPT di lingkungan KKP	Naskah Akademik	Biro SDMAO
					Pengusulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Surat Usulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Biro SDMAO
					Penyusunan Rancangan Peraturan terkait organisasi dan tata kerja KKP (RPerpres/RPermenKP)	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan KKP	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan KKP	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan KKP	Rancangan Peraturan Presiden/ Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan	Biro SDMAO

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
									Perikanan terkait organisasi dan tata kerja KKP	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi</li> <li>2. Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi</li> <li>3. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan</li> <li>4. Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Penataan Organisasi berdasarkan hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional</li> <li>2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan dengan pengajuan perubahan organisasi dan penyederhanaan birokrasi</li> </ol>	<p>Pelaksanaan identifikasi Jabatan Administrasi yang dapat dan yang tidak disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan KKP</p>					Hasil identifikasi Jabatan Administrasi yang dapat dan yang tidak disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan KKP	Biro SDMAO
				<p>Pengusulan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat usulan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional</li> <li>2. Hasil validasi Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional</li> </ol>	Biro SDMAO
				<p>Pengusulan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Usulan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional</li> <li>2. Surat Persetujuan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan</li> </ol>	Biro SDMAO

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
									Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	
				Penetapan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional					Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP	Biro SDMAO
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi</li> <li>2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi</li> <li>3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi</li> <li>4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok</li> <li>5. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan</li> <li>6. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya</li> <li>7. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang</li> </ol>	Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah					Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan	Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan	Biro SDMAO

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		langsung berada di bawahnya 8. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan 9. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan lembaga 10. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain 11. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis 12. Terdapat hasil evaluasi kelembagaan								
		Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dengan pengajuan perubahan organisasi yang tepat fungsi		Pengusulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Pengusulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Surat Usulan Penataan Organisasi KKP dan/atau UPT di lingkungan KKP kepada KemenPANRB	Biro SDMAO
		Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dengan menetapkan struktur organisasi yang tepat fungsi	Pengusulan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional					1. Surat Usulan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	Biro SDMAO

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
									2. Surat Persetujuan Penyederhanaan Birokrasi KKP dalam rangka Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional	
		Organisasi Berbasis Kinerja sesuai dengan proses bisnis dan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan	Pelaksanaan <i>Assesment</i> organisasi berbasis kinerja			Penyusunan pedoman <i>asement</i> organisasi berbasis kinerja			Pedoman <i>asement</i> organisasi berbasis kinerja	Biro SDMAO
							Pelaksanaan <i>asesment</i> organisasi berbasis kinerja		Laporan hasil pelaksanaan <i>asesment</i> organisasi berbasis kinerja	
		Penyederhanaan Organisasi	Pelaksanaan restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil asesmen					Pengusulan Penataan Organisasi KKP kepada KemenPANRB	Surat Usulan Penataan Organisasi KKP kepada KemenPANRB	Biro SDMAO

#### D. RENCANA KERJA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja di Kementerian	1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen	1. KKP memiliki Arsitektur SPBE	1. Penerapan Tata Kelola SPBE	Monitoring dan Evaluasi Program Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP					Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pusdatin

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
Kelautan dan Perikanan.	pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan				Pengajuan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP					
						Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP		
				2. KKP memiliki Peta Rencana SPBE	Penerapan peta rencana strategi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Penerapan peta rencana strategi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP				Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP
						Perluasan penerapan sesuai dengan peta rencana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Perluasan penerapan sesuai dengan peta rencana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Perluasan penerapan sesuai dengan peta rencana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP		
		3. Tim Koordinasi SPBE KKP melaksanakan tugas dan program kerjanya	2. Penerapan tugas dan program tim koordinasi SPBE KKP	Pelaksanaan tugas dan program kerja tim koordinasi SPBE KKP	Pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan manajemen resiko SPBE	Pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan manajemen resiko SPBE	Pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan manajemen resiko SPBE	Pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan manajemen resiko SPBE	Data dukung SPBE Hasil penilaian internal SPBE KKP	Pusdatin
		4. KKP menerapkan Manajemen Layanan SPBE	3. Pengelolaan unsur layanan SPBE	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP	Pelaksanaan manajemen layanan dalam Master Plan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi KKP		Pusdatin
5. KKP memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	4. Penerapan Layanan SPBE	Pengembangan aplikasi layanan kepegawaian KKP -ePresensi -Talent Management	Pembangunan aplikasi eABK dan evaluasi kebijakan aplikasi layanan kepegawaian KKP	Sosialisasi aplikasi umum	Penerapan layanan aplikasi umum	Penerapan layanan aplikasi umum	Kebijakan dan proses bisnis aplikasi umum kepegawaian	Sekretariat Jenderal		

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
					menuju aplikasi umum					
		6. KKP memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik		Monitoring dan evaluasi layanan kearsipan KKP	Evaluasi kebijakan layanan kearsipan KKP menuju aplikasi umum	Sosialisasi aplikasi umum	Penerapan layanan aplikasi umum	Penerapan layanan aplikasi umum	Kebijakan dan proses aplikasi kearsipan	Sekretariat Jenderal
		7. KKP memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik			Pengembangan ebudgeting, ePlanning, eKinerja		Pengembangan ebudgeting, ePlanning, eKinerja	Pengembangan ebudgeting, ePlanning, eKinerja	Proses Bisnis Integrasi Kinerja-Ku-Edalwas-ePlanning	Sekretariat Jenderal
		8. KKP memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik		Perluasan peembangan aplikasi layanan publik	Evaluasi hasil perluasan aplikasi layanan publik	Penerapan perluasan aplikasi layanan publik	Penerapan perluasan aplikasi layanan publik	Penerapan perluasan aplikasi layanan publik	Proses aplikasi bisnis layanan publik	Seluruh unit kerja perizinan berusaha dan Pusdatin
		9. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	5. Mengimplemen tasikan digitalisasi bidang proses bisnis utama, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Satu Data tentang penggunaan prinsip portal Satu Data	Sosialisasi dan implementasi penggunaan portal Satu Data	Sosialisasi dan implementasi penggunaan portal Satu Data	Sosialisasi dan implementasi penggunaan portal Satu Data	Sosialisasi dan implementasi penggunaan portal Satu Data	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Aplikasi Satu Data	Pusdatin
		10. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal		Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Pengembangan aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Aplikasi bidang administrasi pemerintahan di KKP	Sekretariat Jenderal
		11. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal		Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Pengembangan aplikasi bidang pelayanan publik kelautan dan perikanan	Aplikasi pelayanan publik	Seluruh unit kerja perizinan berusaha dan Pusdatin
	2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan	12. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik	6. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Integrasi Aplikasi pelayanan publik dengan instansi lain	Dokumentasi aplikasi	Seluruh unit kerja perizinan berusaha dan Pusdatin
					Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Layanan Publik	Dokumen hasil evaluasi integrasi aplikasi	





TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		18. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	8. Penyelarasan peta proses bisnis dengan SOP	Penyelarasan dan penetapan peta proses bisnis dan SOP	Penyelarasan dan penetapan peta proses bisnis dan SOP	Implementasi peta proses bisnis yang telah dijabarkan ke dalam SOP	Implementasi peta proses bisnis yang telah dijabarkan ke dalam SOP	Implementasi peta proses bisnis yang telah dijabarkan ke dalam SOP	Peta proses bisnis dan SOP	Seluruh unit kerja
		19. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		Penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Monitoring penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Monitoring penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Monitoring penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP	Peta proses bisnis dan SOP	Seluruh unit kerja
		20. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	9. Penerapan SOP dalam kegiatan di lingkungan KKP	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Penerapan SOP dalam kegiatan di setiap unit kerja	Data dukung dan dokumentasi penerapan SOP	Seluruh unit kerja
		21. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	10. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Pengembangan aplikasi keterbukaan informasi publik	Sosialisasi dan penerapan aplikasi keterbukaan informasi publik	Penerapan aplikasi keterbukaan informasi publik	Penerapan aplikasi keterbukaan informasi publik	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019 Surat Keterangan PPID	Biro HKLN
		22. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Laporan monitoring dan evaluasi	Biro HKLN

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
	3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan	23. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	12. Penetapan peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Penyusunan dan penetapan peta proses bisnis KKP	Penyusunan dan penetapan peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Implementasi peta proses bisnis KKP	Peta proses bisnis KKP Kebijakan penyederhanaan jabatan	Biro SDMAO
		24. Peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	13. Evaluasi peta proses bisnis dan SOP secara berkala	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) masing-masing unit kerja	Laporan evaluasi peta proses bisnis dan SOP	Seluruh unit kerja
		25. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi		Monitoring dan evaluasi peta proses bisnis	Monitoring dan evaluasi berdasarkan OTK baru dan penyederhanaan birokrasi	Monitoring dan evaluasi berdasarkan OTK baru dan penyederhanaan birokrasi	Monitoring dan evaluasi berdasarkan OTK baru dan penyederhanaan birokrasi	Monitoring dan evaluasi berdasarkan OTK baru dan penyederhanaan birokrasi	Laporan evaluasi peta proses bisnis	Seluruh unit kerja
4. Meningkatnya kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan	26. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI meningkat	14. Melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Identifikasi arsip Pemberkasan arsip aktif Penyusunan daftar arsip aktif Penataan arsip inaktif Penyusunan arsip Proses kearsipan secara digital diharapkan untuk segera berjalan di KKP dengan menggunakan eLayar semua pada unit kerja Pengajuan akreditasi	Pemberkasan dan daftar arsip aktif Penataan dan penyusunan arsip inaktif Penggunaan eLayar semua unit kerja Pengelolaan dan pengendalian arsip secara digital melalui eLayar Proses akreditasi	Pemberkasan dan daftar arsip aktif secara digital Penataan dan penyusunan arsip inaktif Penggunaan eLayar semua unit kerja Pengelolaan dan pengendalian arsip secara digital Terakreditasi	Identifikasi arsip vital yang harus dikelola KKP Identifikasi dan perencanaan ruang penyimpanan arsip vital KKP Pemberkasan aktif secara digital Arsip digital	Alih media arsip vital Ruang arsip vital KKP Modern record management Arsip digital	Dokumen data dukung pengelolaan arsip sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Biro Umum	

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN PRIORITAS	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		27. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP meningkat	15. Melakukan pengadaan barang/jasa sesuai aturan	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen data dukung penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum
		28. Indeks Pengelolaan Keuangan dari Kementerian Keuangan meningkat	16. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Mapping dan Integrasi Database Pengelolaan Keuangan Tindak Lanjut Rekomendasi TP BPK-RI dan APIP Tata Kelola Peraturan Keuangan Lingkup KKP	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan (SIPEKA) dan Renstra Pengelolaan Keuangan diseluruh entitas Lingkup KKP	Revisi PermenKP Sistem Informasi dan Pelaporan Keuangan termasuk Badan Layanan Umum Lingkup KKP berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern ISO 31000 2018	Implementasi PermenKP SIPK basis TI dan SPI ISO 31000	Implementasi PermenKP SIPK basis TI dan SPI ISO 31000	Dokumen data dukung penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan	Biro Keuangan
		29. Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan meningkat	17. Melakukan pengelolaan atas aset/Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Dokumen data dukung penilaian Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara	Biro Keuangan

### E. RENCANA KERJA AREA SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kebutuhan dan	7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai	1. Terdapat kebijakan standar pelayanan 2. Standar pelayanan telah	1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik KKP	1. Biro SDMAO 2. Biro Hukum
					Penyusunan Keputusan Menteri				Keputusan Menteri tentang Jenis	Pusdatin

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
				2020	2021	2022	2023	2024				
harapan masyarakat.	kebutuhan dan harapan masyarakat 8. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing	dimaklumkan	Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)		tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP					Pelayanan Publik di Lingkungan KKP		
					Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP dan Keputusan Menteri tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP					Laporan Sosialisasi	Pusdatin	
				Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Dokumen Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP		
				Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Tampilan publikasi Standar Pelayanan pada <i>website</i> , media sosial, dan media televisi, media cetak, dan publikasi pada tempat umum dan tempat strategis, serta pada ruang tunggu pelayanan	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP		
				3. Dilakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan	2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala		Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Laporan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
							Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Laporan Evaluasi Standar Pelayanan	1. Pusdatin 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
							Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Laporan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di KKP	3. Pusdatin

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
					pelayanan publik di KKP	pelayanan publik di KKP	pelayanan publik di KKP	pelayanan publik di KKP		
		<p>4. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media</p> <p>5. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan</p> <p>6. Pelayanan dengan menerapkan teknologi informasi telah dilakukan perbaikan secara terus menerus</p>	<p>3. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan</p> <p>4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau</p>	<p>Penginputan informasi pelayanan publik KKP ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANRB</p>					<p>Screenshot informasi pelayanan publik KKP pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANRB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat SKK</li> <li>- Pusdatin</li> <li>- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP</li> </ul>
					Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dalam aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dalam aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dalam aplikasi SIPP Kementerian PANRB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dalam aplikasi SIPP Kementerian PANRB	<p><i>Screenshot</i> informasi pelayanan publik KKP pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANRB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat SKK</li> <li>- Pusdatin</li> <li>- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP</li> </ul>
				Penyampaian informasi pelayanan publik melalui <i>website</i> /media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui <i>website</i> /media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui <i>website</i> /media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui <i>website</i> /media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui <i>website</i> /media sosial	<p><i>Screenshot</i> informasi pelayanan publik melalui <i>website</i>/media sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat SKK</li> <li>- Pusdatin</li> <li>- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP</li> </ul>
				Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Laporan pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusdatin</li> <li>- Pusat SSK</li> <li>- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP</li> </ul>
				Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Laporan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusdatin</li> <li>- Pusat SSK</li> <li>- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP</li> </ul>
		7. Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	5. Pengembangan sistem pelayanan dengan		Penyusunan R.Permen KP tentang Pedoman				Rancangan Permen KP tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Atap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Hukum</li> <li>- Pusdatin</li> <li>- Pusat SSK</li> </ul>

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
			mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik		Pelayanan Terpadu Satu Atap					
				Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Laporan pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	- Pusdatin - Pusat SSK
		8. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	6. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Laporan Penanganan Pengaduan	Inspektorat V
		9. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab		Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Laporan penanganan pengaduan dan konsultasi	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		10. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	SK Tim Penanganan Pengaduan UPP	1. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		11. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Laporan Pelaksanaan Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Inspektorat V
		12. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Laporan pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Inspektorat V

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		13. Terdapat inovasi pelayanan 14. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik 15. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/ pelayanan telah dipermudah	7. Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Laporan penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
				Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Proposal Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka partisipasi KIPP  SK Penetapan Peraih Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik dari KemenPANRB	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang berpartisipasi dalam KIPP  - Pusat SKK - Pusdatan
		16. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	8. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		17. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	9. Mendorong unit kerja untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan Sosialisasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 2. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
			10. Mempublikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	<i>Screenshot/Foto</i> Pengumuman hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara <i>online dan offline</i>	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		18. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	11. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		19. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	12. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Laporan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	- Puslatluh KP - Pusdatin - Pusat SSK - Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		20. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	13. Pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi	Penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi				Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi	- Biro Hukum - Pusat SSKP - Pusdatin - Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I
		21. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar			Sosialisasi Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi				Laporan Sosialisasi Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi	- Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I - Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
				Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Laporan pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		22. Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Laporan Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP	- Ombudsman; dan/atau - Inspektorat II



**F. RENCANA KERJA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS**

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
Menciptakan KKP yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam penyusunan Renstra	Penyusunan Rencana Strategis berbasis BSC		Reviu Rencana Strategis		Reviu Rencana Strategis	1. Renstra 2020-2024 2. Dokumen Reviu Rencana Strategis	seluruh unit kerja
				Rapat Koordinasi KKP	Rapat Koordinasi KKP	Rapat Koordinasi KKP	Rapat Koordinasi KKP	Laporan hasil Rapat Koordinasi	Sekretariat Jenderal	
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja level 0-2	seluruh unit kerja
				Seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan level terendah (termasuk jabatan fungsional)	Seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan level terendah (termasuk jabatan fungsional)	Seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan level terendah (termasuk jabatan fungsional)	Seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan level terendah (termasuk jabatan fungsional)	Laporan hasil seremonial	seluruh unit kerja	
				Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan daerah	Perjanjian Kinerja Dekonsentrasi 34 provinsi	Unit pelaksana Dekonsentrasi	
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi kinerja	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	Penyusunan laporan kinerja secara berkala	1. Laporan kinerja triwulanan 2. Laporan kinerja tahunan 3. Laporan Tahunan  (yg ditandatangani pimpinan)	seluruh unit kerja
		Pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	Penguatan pemahaman pimpinan dan seluruh penanggung jawab kinerja	Survey tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	Survey tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	Survey tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	Survey tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	Survey tingkat pemahaman atas Rencana Strategis	laporan hasil survey	seluruh unit kerja
		Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	Penguatan pemahaman pimpinan dan seluruh penanggung jawab kinerja	Survey tingkat pemahaman atas Perjanjian Kinerja	Survey Tingkat Pemahaman Atas Perjanjian Kinerja	Survey Tingkat Pemahaman Atas Perjanjian Kinerja	Survey Tingkat Pemahaman Atas Perjanjian Kinerja	Survey Tingkat Pemahaman Atas Perjanjian Kinerja	laporan hasil survey	seluruh unit kerja

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
				Penetapan indikator kinerja	Penetapan indikator kinerja	Penetapan indikator kinerja	Penetapan indikator kinerja	Penetapan indikator kinerja	1. SK IKU 2. Manual IKU	seluruh unit kerja
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam pelaporan kinerja	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Penyusunan Rencana Aksi (khusus level 1 dan level 2)	Matriks rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh level 1 dan 2	seluruh unit kerja
Meningkatnya kemampuan KKP dalam mengelola kinerja organisasi	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Capacity building SDM pengelola kinerja dan studi tiru	Capacity building SDM pengelola kinerja dan studi tiru	Capacity building SDM pengelola kinerja dan studi tiru	Capacity building SDM pengelola kinerja dan studi tiru	Capacity building SDM pengelola kinerja dan studi tiru	Capacity building SDM pengelola kinerja dan studi tiru	Capacity building SDM pengelola kinerja dan studi tiru	1. Forum Manajemen Kinerja 2. Bimtek Kinerja 3. Benchmarking Kinerja	seluruh unit kerja
		Pendampingan implementasi SAKIP	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	Pendampingan implementasi SAKIP di Pusat dan UPT	1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan kinerja di Pusat dan/atau UPT 2. Rekonsiliasi Kinerja	seluruh unit kerja
		Penetapan Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	Penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi	SK Tim <b>Tata Kelola Kinerja</b> Organisasi	seluruh unit kerja
	Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Penyusunan pedoman pengelolaan kinerja		Reviu Pedoman Pengelolaan Kinerja			Reviu Pedoman Pengelolaan Kinerja	Dokumen Reviu Pedoman Kinerja		
	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi	1. Kinerjaku 2. SMART DJA 3. OM SPAN 4. Emonev Bappenas	seluruh unit kerja
	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran		Pengembangan ebudgeting, ePlanning, eKinerja			Pengembangan ebudgeting, ePlanning, eKinerja	Pengembangan ebudgeting, ePlanning, eKinerja	Proses Bisnis Integrasi Kinerjaku, Edalwas, ePlanning	Sekretariat Jenderal

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		Pemberian <i>Reward and Punishment</i> terhadap hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja	Penetapan aturan terkait Tukin berbasis kinerja	Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pemberian tunjangan kinerja		Reviu Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pemberian tunjangan kinerja			1. Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pemberian tukin 2. Dokumen Reviu	Sekretariat Jenderal
		Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (kerangka logis kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Peningkatkan kualitas penyelarasn kinerja unit kepada kinerja organisasi ( <i>goal and strategy cascade</i> )	<i>Cascading</i> Peta strategi	<i>Cascading</i> Peta strategi	<i>Cascading</i> Peta strategi	<i>Cascading</i> Peta strategi	<i>Cascading</i> Peta strategi	Matriks <i>cascading</i>	seluruh unit kerja
	Meningkatnya kemampuan KKP dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi	Indek Perencanaan yang meningkat	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector ( <i>collaborative and crosscutting</i> )	Penyusunan Pohon Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	Pohon Kinerja	seluruh unit kerja
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran KKP	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Penetapan program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	1. PermenKP tentang Rencana Kerja KKP 2. Laporan evaluasi Program dan Kegiatan	seluruh unit kerja
			<i>Refocussing</i> anggaran untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	<i>Refocussing</i> anggaran terhadap kinerja	<i>Refocussing</i> anggaran terhadap kinerja	<i>Refocussing</i> anggaran terhadap kinerja	<i>Refocussing</i> anggaran terhadap kinerja	<i>Refocussing</i> anggaran terhadap kinerja	Surat hasil <i>refocussing</i>	seluruh unit kerja

## G. RENCANA KERJA AREA PENGAWASAN

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Opini WTP Laporan Keuangan KKP dan Tingkat Maturitas SPI KKP	Peningkatan Kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan negara dan pengamanan aset di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	Menerbitkan SK Satgas SPIP di tingkat Kementerian dan SK Satgas SPIP di tingkat Eselon I	SK Satgas SPIP KKP dan Eselon I	1. Biro Keuangan 2. Sekretariat Eselon I lingkup KKP
				Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern terhadap Tim SPIP di lingkup kewenangannya	1. Laporan Satgas SPIP Kementerian dan Eselon I 2. Laporan Pemantauan Satgas SPIP Eselon I	1. Biro Keuangan 2. Sekretariat Eselon I lingkup KKP
				Satgas SPIP Eselon I melaksanakan monev dalam rangka penilaian maturitas SPIP dan tindak lanjut atas rekomendasi penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP tahun sebelumnya	Satgas SPIP Eselon I melaksanakan monev dalam rangka penilaian maturitas SPIP dan tindak lanjut atas rekomendasi penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP tahun sebelumnya	Satgas SPIP Eselon I melaksanakan monev dalam rangka penilaian maturitas SPIP dan tindak lanjut atas rekomendasi penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP tahun sebelumnya	Satgas SPIP Eselon I melaksanakan monev dalam rangka penilaian maturitas SPIP dan tindak lanjut atas rekomendasi penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP tahun sebelumnya	Satgas SPIP Eselon I melaksanakan monev dalam rangka penilaian maturitas SPIP dan tindak lanjut atas rekomendasi penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP tahun sebelumnya	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Maturitas SPIP	1. Biro Keuangan 2. Sekretariat Eselon I lingkup KKP
			Penguatan Efektifitas Manajemen Risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Seluruh Eselon I membuat dan menyelenggarakan manajemen risiko	Dokumen Manajemen Risiko Kegiatan Prioritas Unit Kerja	Seluruh Unit Kerja Eselon I
				Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan manajemen risiko Eselon I	Laporan Hasil Pengawasan MR seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal
			Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/asistensi Pengendalian Internal	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/asistensi Pengendalian Internal	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/asistensi Pengendalian Internal	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/asistensi Pengendalian Internal	Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi/bimtek/asistensi Pengendalian Internal	Laporan sosialisasi/bimtek/ asistensi Pengendalian Internal Pelaporan	Biro Keuangan

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
				Pelaporan Keuangan (PIPK)	Pelaporan Keuangan (PIPK)	Pelaporan Keuangan (PIPK)	Pelaporan Keuangan (PIPK)	Pelaporan Keuangan (PIPK)	Keuangan (PIPK)	
				Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Eselon I menyelenggarakan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	Laporan PIPK	1. Biro Keuangan 2. Seluruh Eselon I lingkup KKP
				Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Reviu PIPK tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian	Laporan Reviu PIPK eselon I dan Kementerian	Inspektorat Jenderal
	Tingkat tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan KKP	Peningkatan ketertiban pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai peraturan dan prinsip etika pengadaan barang/jasa, serta bebas KKN dan fraud	Melakukan pengelolaan barang/jasa sesuai aturan	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh eselon I	Laporan hasil pengawasan pengadaan barang/jasa	Inspektorat Jenderal
	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (indeks Internal Audit Capability Model/IACM)	Peningkatan Profesionalitas SDM Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan KKP	Meningkatkan Kompetensi APIP;	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi SDM APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi SDM APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi SDM APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi SDM APIP	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan diklat/seminar/workshop/ studi banding bagi SDM APIP	Laporan hasil diklat/seminar/workshop/ studi banding	Inspektorat Jenderal
				Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Assessment Auditor	Hasil assessment	Inspektorat Jenderal
			Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas).	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Auditor dan e-formasi	1. Dokumen ABK dan e-Formasi Tahunan; 2. Dokumen Analisa Jabatan	Inspektorat Jenderal
			Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP		Studi banding Kebijakan Penanganan Benturan dan/atau Focus Group Discussion	Penyusunan rancangan revisi PermenKP No 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di	Sosialisasi dan implementasi Revisi PermenKP No 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan	Evaluasi atas implementasi Revisi PermenKP No 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan	1. Hasil studi banding dan/atau laporan FGD; 2. Rancangan Revisi PermenKP No 13 Tahun 2016	1. Biro Hukum 2. Seluruh Eselon I 3. Itjen

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
					Kajian Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP	lingkungan KKP Keterangan: Mengganti kata "usulan" menjadi "penyusunan"	Kepentingan di lingkungan KKP	Kepentingan di lingkungan KKP	tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP; 3. Laporan sosialisasi dan implementasi ; 4. Hasil evaluasi	
				Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Eselon I	Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Inspektorat Jenderal
	Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan KKP	Penurunan penyalahgunaan wewenang di lingkungan KKP	Penguatan penanganan pengaduan masyarakat dan komplain	Mengusulkan rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 44/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Pengaduan seluruh Eselon I				1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Pengaduan 2. Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi	1. Itjen 2. Setjen (Biro Hukum)
				Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menetapkan Surat Keputusan Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR Tahun 2020 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	SK Menteri Tim Penanganan Pengaduan dan Admin LAPOR	1. Itjen 2. Seluruh eselon I dan UPT
					Mengintegrasikan seluruh layanan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada aplikasi LAPOR				Laporan Penanganan Layanan Pengaduan yang terintegrasi pada LAPOR!	1. Itjen 2. Seluruh eselon I
				Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan	Laporan Monev penanganan Pengaduan Masyarakat	Itjen

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
				pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat		
					Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dengan KKP terkait penggunaan aplikasi Whistleblowing System (WBS) versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)				1. MoU atau Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan KKP terkait pengelolaan aplikasi WBS	Inspektorat V
					Bimtek aplikasi Whistleblowing System (WBS) versi KPK				2. Laporan Bimtek	Inspektorat V
					Pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan KKP menggunakan aplikasi WBS versi KPK	Pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan KKP menggunakan aplikasi WBS versi KPK	Pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan KKP menggunakan aplikasi WBS versi KPK	Pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan KKP menggunakan aplikasi WBS versi KPK	Laporan pengelolaan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bulanan)	Inspektorat V
					Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Whistleblowing System	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Whistleblowing System	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Whistleblowing System	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Whistleblowing System	Laporan Monev Penanganan Whistleblowing System	Itjen (Itj. 5)
			Penguatan pengendalian gratifikasi		Penyusunan rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi				1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi	1. Itjen (Itj. 5) 2. Setjen (Biro Hukum)
					Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis				2. Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi	1. Itjen (Itj. 5) 2. Setjen (Biro Hukum)

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
					Pengendalian Gratifikasi					
				Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi terintegrasi dengan aplikasi GOL KPK	Laporan Monev program pengendalian gratifikasi	UPG KKP, Eselon I, dan UPT
			Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	Laporan Hasil Pemantauan atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN/LHKASN di seluruh Eselon I	1) Itjen; 2) Biro SDMAO
				Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Laporan Verifikasi LHKASN di seluruh Eselon I	Itjen
	Tercapainya tata kelola yang baik di unit kerja	Peningkatan integritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 50% satker/UPT KKP)	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 70% satker/UPT KKP)	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 80% satker/UPT KKP)	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 100% satker/UPT KKP)	Unit kerja Eselon I menyelenggarakan Pembangunan zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM (kumulatif s.d. Tahun 2020 100% satker/UPT KKP)	1. SK Eselon I tentang penetapan satker yang dibangun ZI 2. Laporan Pembangunan ZI unit kerja Eselon I	Seluruh Eselon I dan Itjen
				Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan pembangunan unit kerja yang dibangun ZI	Laporan pengawasan pembangunan ZI oleh Inspektorat mitra dan Laporan hasil penilaian Inspektorat V	Inspektorat I s.d. V



## H. RENCANA KERJA AREA PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	23. Terdapat kebijakan standar pelayanan  24. Standar pelayanan telah dimaklumkan	14. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat SKM)	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik KKP	3. Biro SDMAO 4. Biro Hukum
					Penyusunan Keputusan Menteri tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP				Keputusan Menteri tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Pusdatin
		Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP dan Keputusan Menteri tentang Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan KKP					Laporan Sosialisasi	Pusdatin		
	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan		Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Dokumen Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	3. Pusdatin 4. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP		
	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka		Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan oleh Unit Pelayanan Publik KKP secara luas, jelas, dan terbuka	Tampilan publikasi Standar Pelayanan pada <i>website</i> , media sosial, dan media televisi, media cetak, dan publikasi pada tempat umum dan tempat strategis, serta pada ruang tunggu pelayanan	3. Pusdatin 4. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP		
		25. Dilakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan	15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala		Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	Laporan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik	3. Pusdatin 4. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
					Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Evaluasi Standar Pelayanan	Laporan Evaluasi Standar Pelayanan	4. Pusdatin 5. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di KKP	Evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di KKP	Laporan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di KKP	6. Pusdatin
		26. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 27. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan 28. Pelayanan dengan menerapkan teknologi informasi telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	16. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan 17. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Penginputan informasi pelayanan publik ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANREB					Screenshot informasi pelayanan publik KKP pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANREB	- Pusat SKK - Pusdatin - Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
					Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANREB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANREB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANREB	Pembaharuan informasi pelayanan publik KKP dala aplikasi SIPP Kementerian PANREB	Screenshot informasi pelayanan publik KKP pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian PANREB	- Pusat SKK - Pusdatin - Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
				Penyampaian informasi pelayanan publik melalui website/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui website/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui website/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui website/media sosial	Penyampaian informasi pelayanan publik melalui website/media sosial	Screenshot informasi pelayanan publik melalui website/media sosial	- Pusat SKK - Pusdatin - Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
				Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Laporan pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	- Pusdatin - Pusat SSK - Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
				Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	Laporan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik	- Pusdatin - Pusat SSK - Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		29. Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	18. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik		Penyusunan R.Permen KP tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Atap				Rancangan Permen KP tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Atap	- Biro Hukum - Pusdatin - Pusat SSK
				Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	Laporan pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu di KKP	- Pusdatin - Pusat SSK
		30. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	19. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Penanganan Pengaduan KKP yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR melalui website kkp.lapor.go.id	Laporan Penanganan Pengaduan	Inspektorat V
		31. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab		Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Merespon dan menangani pengaduan dan konsultasi sesuai SOP	Laporan penanganan pengaduan dan konsultasi	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		32. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan UPP	SK Tim Penanganan Pengaduan UPP	3. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 4. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		33. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan		Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Laporan Pelaksanaan Forum Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan KKP	Inspektorat V

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan								
		34. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi		Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Laporan pemantauan dan evaluasi penanganan tindak lanjut pengaduan secara berkala	Inspektorat V
		35. Terdapat inovasi pelayanan 36. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik 37. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/ pelayanan telah dipermudah	20. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik  Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik  Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik  Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik  Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik  Berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Laporan penciptaan atau pengembangan inovasi pelayanan publik  Proposal Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka partisipasi KIPP  SK Penetapan Peraih Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik KKP dari KemenPANRB	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP  Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang berpartisipasi dalam KIPP  - Pusat SKK - Pusdatan
		38. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	21. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		39. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	22. Mendorong unit kerja untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan Sosialisasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	3. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 4. Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
			23. Mempublikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online dan offline	<i>Screenshot/Foto</i> Pengumuman hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara <i>online dan offline</i>	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		40. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	24. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP
		41. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	25. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi petugas pelayanan	Pelaksanaan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	Laporan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima/ <i>coaching clinic</i> Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puslatluh KP</li> <li>- Pusdatin</li> <li>- Pusat SSK</li> <li>- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP</li> </ul>
		42. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	26. Pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi	Penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi				Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Hukum</li> <li>- Pusat SSKP</li> <li>- Pusdatin</li> <li>- Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I</li> </ul>
		43. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar			Sosialisasi Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi				Laporan Sosialisasi Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan, Sanksi, dan Kompensasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh Sekretariat Unit Kerja Eselon I</li> <li>- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP</li> </ul>
				Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan kepada penerima layanan	Penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan kepada penerima layanan	Laporan pelaksanaan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan KKP</li> </ul>

TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	KONDISI YANG MENJADI TOLAK UKUR	KEGIATAN	RENCANA KERJA					OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
		44. Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP berada pada zona hijau (kepatuhan tinggi)	Laporan Tingkat Kepatuhan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik KKP	- Ombudsman; dan/atau - Inspektorat II

BAB IV  
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi disusun melibatkan para pemangku kepentingan dengan upaya kerja keras seluruh Tim yang terlibat didalamnya, proses diskusi yang panjang dan berbagai pertemuan pleno yang banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun.

Proses reformasi Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi. Sebuah proses perjalanan, yang ditujukan pada perubahan pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*cultural set*), dan sistem manajemen pemerintah sebagai faktor untuk mewujudkan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan public, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Namun demikian, kerja keras belum berhenti sampai pada tahapan dokumen ini selesai disusun, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai pada saat implementasi berbagai rencana yang telah disusun dalam dokumen ini. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya kerja yang lebih keras untuk benar-benar mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan **Hebat**.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO